

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi. Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi: *agents* mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*⁷. Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk memonitor kinerja *agents* dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien Alfiana, (2017).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Menurut Purwasih, (2017) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri Alfiana, (2017).

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta laporan. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Apabila dikaji dari entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga *non profit* dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, karenanya akuntansi keuangan daerah termasuk akuntansi sektor publik. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). *Input* sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dana atau keterjadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Susilawati (2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan

Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan, Zahro (2012). Yulistia (2017) menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya.
2. *Value for Money*, indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. *Value for Money* mencakup ketidakhematan dan ketidakefektifan.
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*), pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalisir.
4. Transparansi, keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

5. Pengendalian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

2.3 Faktor Keperilakuan Organisasi

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi, Roza (2012). Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka, Yulistia (2017). Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti diimplementasikannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di dalam organisasi. Faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi jalannya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut. Faktor lingkungan organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan.

2.4 Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas, Solichin (2015). Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem, selain itu dapat dijelaskan pula bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan melatih yang bertujuan menyediakan sarana bagi pengguna/peserta untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau khawatir dalam proses implementasi, Zahro (2012).

Pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan kemampuan karyawan atau pegawai dalam suatu institusi, sehingga pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi karyawan atau pegawai. Program pelatihan (*training*) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Tujuan utama dalam sebuah organisasi adalah sebagai perencanaan sumber daya manusia, pelayanan yang diperlukan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan, pengawasan kegiatan-kegiatan, penghargaan. Kejelasan tujuan akan mendorong organisasi untuk melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan. Yulistia (2017). Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Menurut Yati (2014), untuk mencapai program pelatihan, maka harus memperhatikan sasaran yang jelas, memakai tolok ukur terhadap hasil yang dicapai. Pelatihan harus diberikan oleh tenaga pengajar yang kompeten, yang mampu menyampaikan ilmunya dengan baik, serta dapat memotivasi peserta pelatihan dengan baik.

2.5 Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, Zahro (2012). Kejelasan tujuan diartikan ketika akan menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, tujuan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut telah dijelaskan dan disepakati. Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika akan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan telah ada persetujuan tentang tujuan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bermanfaat untuk semua bagian dalam departemen/dinas, Yati (2014).

Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, Janitra (2015). Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki, Engko (2013).

2.6 Dukungan Atasan

Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, selain itu dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dukungan atasan dapat memberikan hasil positif untuk pegawai. Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru dan mengembangkan daya inovatif bawahannya, Janitra (2015). Dukungan atasan sangat penting dalam menentukan efektivitas penerimaan informasi dalam organisasi dan manajemen puncak mengetahui rencana instansi pemerintahan sehingga peraturan yang baru yang akan dikembangkan seharusnya sesuai dengan rencana instansi pemerintahan dan dengan demikian peraturan yang baru akan mendorong tercapainya instansi pemerintah dengan adanya kekuasaan atasan terkait dengan sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi peraturan baru, Irsyadi (2015).

Dukungan atasan sangat penting dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam penerapan sistem baru. Dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi

pemerintahan tidak adanya dukungan manajemen puncak maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai, Kayati (2016).

2.7 Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien Abdulla, (2014). Menurut Putranto (2014) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Budiasih (2014) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi

akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah Andini, (2015).

2.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Jumaili (2015) mengemukakan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya mempertimbangkan pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai sistem informasi, sehingga sistem informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

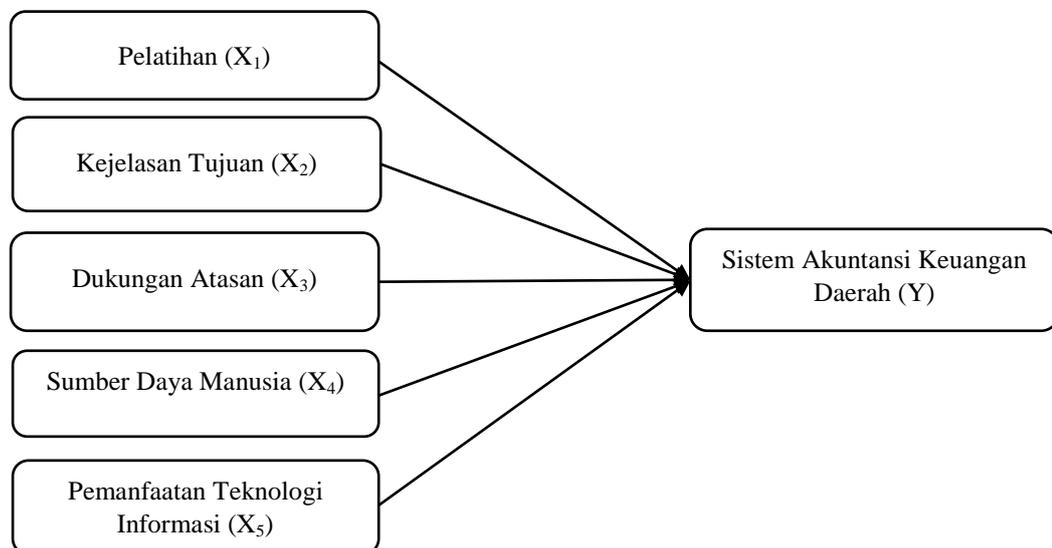
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Verawati (2013)	Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Karang Anyar	Dukungan Atasan (X_1), Kejelasan Tujuan (X_2) dan Pelatihan (X_3), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
2	Yati (2014)	Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Pada Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar).	Kejelasan Tujuan (X_1), Pelatihan (X_2), Dukungan Atasan (X_3) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Y)	Kejelasan tujuan, pelatihan dan dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah.
3	Martilova (2015)	Pengaruh Faktor-Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan Variabel konflik Kognitif dan Efektif Sebagai	Pelatihan (X_1), Kejelasan Tujuan (X_2), Dukungan Atasan (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) dan Sistem Akuntansi	Pelatihan dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan kejelasan tujuan dan dukungan atasan tidak

		Variabel Intervening.	Keuangan Daerah (Y)	berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
4	Abdiel Janitra (2015)	Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus di DPPKAD Subosukawonosraten)	Dukungan Atasan (X_1), Kejelasan Tujuan (X_2) dan Pelatihan (X_3), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
5	Yulistia (2017)	Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Pelatihan (X_1), Kejelasan Tujuan (X_2), Dukungan Atasan (X_3) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	Pelatihan dan kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
6	Alfiana (2017)	Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem	Pelatihan (X_1), Kejelasan Tujuan (X_2), Dukungan Atasan (X_3),	Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem

		Akuntansi Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Timur	Sumber Daya Manusia (X_4) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	akuntansi keuangan daerah. Sedangkan pelatihan, kejelasan tujuan dan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan khawatir dalam proses implementasi, Solichin (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2012) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Artinya, semakin tinggi intensitas pelatihan, maka kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah intensitas pelatihan, maka kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan semakin berkurang.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2.11.2 Pengaruh Kejelasan Tujuan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya, Mranani (2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Kayati (2016) menyatakan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak dijalankan secara tepat maka kegunaan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak akan terwujud.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2.11.3 Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dukungan atasan sangat penting dalam menentukan efektivitas penerimaan informasi dalam organisasi dan manajemen puncak mengetahui rencana instansi pemerintahan sehingga peraturan yang baru yang akan dikembangkan seharusnya sesuai dengan rencana instansi pemerintahan dan dengan demikian peraturan yang baru akan mendorong tercapainya instansi pemerintah dengan adanya kekuasaan atasan terkait dengan sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi peraturan baru, Irsyadi (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Yati (2014) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis khususnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Dukungan atasan merupakan dukungan dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan persediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan hubungannya dengan kemajuan dan efisiensi.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2.11.4 Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kegunaan Akuntansi Keuangan Daerah

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Humancapital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi Komarasari, (2015). Menurut Budiasaih, (2014) SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi system akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Guy *et al.* dalam Andini, (2015) kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Menurut Indriasari dalam Windiastuti, (2013) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Arfan, (2015) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H₄: Terdapat Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kegunaan Akuntansi Keuangan Daerah

2.11.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kegunaan Akuntansi Keuangan Daerah

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern ini, mengakibatkan segala sesuatu yang memungkinkan diatur secara teknologi diusahakan secara maksimal atau secara besar-besaran, dimana sistem kerja secara manual perlahan-lahan mulai tergeser dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Usaha manusia untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi tentunya sangat mendukung proses kerja yang pada awalnya memerlukan waktu yang relatif lama menjadi dapat terselesaikan dengan waktu yang relatif singkat dengan hasil yang memuaskan, walaupun dengan teknologi yang modern pengeluaran atau biaya operasional yang diperlukan akan semakin banyak. Ariawan (2010).

Penggunaan teknologi informasi untuk pendekatan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi akan dapat mempermudah proses-proses yang terkait dengan pengolahan data-data informasi, dalam hal ini transaksi-transaksi akuntansi. Pendekatan pemecahan masalah menggunakan sistem informasi akuntansi menggunakan perangkat keras (hardware) berupa perangkat komputer, dan menggunakan perangkat lunak (software) yaitu aplikasi-aplikasi yang sifatnya menunjang suatu sistem informasi akuntansi itu sendiri. Ariawan (2010)

Menurut Martilova (2015) membuktikan bahwa dalam penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Mranani (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

H₅: Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.